

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM TINJAUAN MSN APPROACH

**(Analisis *System Approach* Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021)**

Melsy Oktary*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
melsioktari@gmail.com

Hasim As'ari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
hasim_asari99@yahoo.co.id

ABSTRACT

In 2020, the whole world is affected by the COVID-19 pandemic, including Indonesia. Covid-19 is very dangerous for the community due to the rapid increase in the number of people affected by Covid-19 in Indonesia, including in the city of Pekanbaru. Pekanbaru City is one of the most densely populated cities so it is easy for this virus to spread, Pekanbaru City has been included in the highest cases of Covid-19, many people have been exposed to Covid-19. The high spread of Covid-19 in the community has prompted the Indonesian government to issue Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. This vaccination policy aims to reduce transmission, reduce morbidity and mortality, achieve group immunity in the community, protect the community from Covid-19 so that they remain socially and economically productive. In this study using qualitative methods with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively using the theory of Yulianto Kadji policy implementation model, namely MSN-Approach (Mentaliti, System, Networking) using the system-approach indicator. The results of this study based on system-approach indicate that the implementation of the vaccination policy has been going quite well but in its implementation there are still obstacles and rejections, namely there are still elderly people who have not been vaccinated, limited vaccine stock, long queues for vaccine implementation.

Keywords: *Implementation, Covid-19, Vaccination, System-Approach*

ABSTRAK

Pada tahun 2020 seluruh dunia terjangkit pandemi Covid-19, termasuk juga di Indonesia. Covid-19 sangat membahayakan masyarakat dikarenakan pesatnya kenaikan masyarakat yang terkena Covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat sehingga mudahnya virus ini menyebar, Kota Pekanbaru pernah masuk dalam kasus tertinggi Covid-19, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19. Tingginya penyebaran Covid-19 di masyarakat membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Kebijakan vaksinasi ini bertujuan, mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data di analisis secara kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan Yulianto Kadji yaitu *MSN-Approach* dengan menggunakan indikator *System-Approach*. Hasil penelitian ini berdasarkan *system-approach* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi telah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan penolakan yakni, masih terdapat lansia yang belum di vaksin, stok vaksin terbatas, terjadinya antrian panjang pada pelaksanaan vaksin.

Kata Kunci: Implementasi, Covid-19, System-approach

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan penyakit virus yang menyebabkan gangguan pernafasan dari gejala ringan hingga ke paru-paru. Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau yang disebut juga dengan COVID-19.

Indonesia adalah salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19. Pada tanggal 2 maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus terkonfirmasi Covid-19. Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona semakin bertambah setiap harinya, Sampai dengan tanggal 6 september 2021 menurut data sebaran dari *website* Covid.go.id bahwa kasus positif di Indonesia telah mencapai 4.133.433 yang sembuh 3.850.68 dan yang meninggal 136.4773 jiwa. Di Pekanbaru, sejak awal pandemi hingga 24 Juni 2021, menurut sumber berita cakaplah.com(25/9/21) tercatat sudah 37.234 kasus Covid-19 di Kota

Pekanbaru. Berdasarkan data yang rilis satgas Covid-19, dari 37.234 kasus yang terkonfirmasi 20.323 di antaranya merupakan kasus bergejala dan 16.772 lainnya tanpa gejala. yang Pasien yang sembuh pertanggal 24 juli 2021 berjumlah 32.754 orang dengan rincian 10.321 pasien yang di rawat di rumah sakit dan 22.433 sembuh setelah menjalani isolasi dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 727 orang. Upaya yang di lakukan Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan *Social distancing* tetapi pemerintah berupaya memutus penyebaran penyakit melalui upaya vaksinasi. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang melakukan Vaksinasi namun juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan Vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Pemerintah sudah berupaya dengan maksimal untuk mengatasi tantangan-tantangan selama masa pandemi Covid-19. Diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) membentuk tim nasional untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. Keputusan Presiden No. 18/2020 yang dikeluarkan pada 3 September 2020 mengatur pembentukan tim pengembangan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan Menteri Perekonomian. Selain itu, Departemen Riset dan Teknologi bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Presiden tentang pekerjaan sehari-hari tim. Pada 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan implementasi rencana vaksin dalam menanggapi pandemi Covid-19. Perpres menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksin (Kemenkes, 2020). Terkait dengan Vaksin virus Covid-19 di Indonesia beberapa vaksin yang telah digunakan menurut kompas.com (10/09/21) sejak Januari hingga Agustus 2021, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) terhadap 6 Vaksin Covid-19 di Indonesia. EUA untuk 6 jenis vaksin Covid-19 di Indonesia ini diterbitkan setelah melalui pengkajian secara intensif oleh Badan POM bersama Tim Komite Nasional Penilaian khusus Vaksin Covid-19 dan Indonesia *Tecnical Advisory Group on Immunization (ITAGI)*. Terkait pentingnya Vaksinasi dalam rangka pengurangan Penyebaran Covid-19, maka Pemerintah Indonesia membuat satu kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini berisi tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Yulianto Kadji (2015) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat terwujud menggunakan pendekatan *MSN-approach*. Di penelitian ini hanya terfokus menggunakan salah satu dari *MSN-approach*, yaitu *system-approach*. Dalam

implementasi kebijakan *system-approach* terdapat 3 sektor yang berkepentingan, yaitu *Government* (pemerintah), *Private Sector* (Swasta), dan *Civil Society* (Masyarakat). Ketiga sektor ini akan membentuk suatu sistem. Sistem ini akan saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya. Dalam implementasi kebijakan Vaksinasi di Pekanbaru implementasinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan (*government*), rumah sakit swasta (*public sector*), dan masyarakat (*civil society*). Dalam BAB 1 Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Sedangkan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah dalam melaksanakan Vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi program atau Vaksinasi Gotong Royong. Penerima Vaksin dan pelayanan Vaksin, keluarga dan individu yang terkait sebagai penerima Vaksin serta tidak dipungut bayaran/gratis. Dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Dinas kesehatan Provinsi secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan distribusi Vaksinasi Covid-19, peralatan pendukung, dan logistik untuk keperluan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Dalam hal fasilitas pelayanan Kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam pelayanan vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau tidak memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat membuka pos pelayanan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3). Target program vaksinasi yakni mereka yang berusia 18-59 tahun tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Jadi sebelum divaksin, petugas akan mengecek dan menanyakan rekam medis peserta Vaksin. Orang di luar kelompok tersebut diharapkan menunggu sampai ada Vaksin yang aman untuk usia lanjut ataupun mereka yang memiliki komorbid. Dalam program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, setiap orang hanya akan mendapatkan satu jenis vaksin. Daftar penerima vaksin akan dicatat dalam sistem yang terpusat dan terintegrasi untuk memastikan setiap orang tidak akan mendapat double Vaksinasi. Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri. Menurut laporan kegiatan Vaksin yang diberikan dinas kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Vaksinasi di 21 Puskesmas, dan 28 rumah sakit daerah maupun swasta. Sementara untuk Vaksinasi massal Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Vaksinasi di Pekanbaru bagian barat, yakni di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani. Pekanbaru bagian selatan RS Rejo

Sari, bagian utara di Gedung Guru PGRI Kota Pekanbaru. Selain itu, Pemerintah Kota juga melaksanakan vaksinasi di Pekanbaru bagian timur, tepatnya di stadion bola kaki Sport Center Rumbai. Kampus UNRI, UIN, UIR, di susul dengan kampus lainnya. Di rumah ibadah, Vaksinasi dilakukan pada imam dan pengurus masjid dan mushola se Kota Pekanbaru, yakni sebanyak 1.336 masjid, dengan target 15 ribu vaksin. Lokasi vaksin Masjid Raya An-Nur di mulai pada hari Minggu. Untuk umat Kristen dan protestan Vaksinasi akan dilaksanakan di HKBP Hangtuah. Berdasarkan hasil wawancara pra riset (5/10/2021) dengan bapak Hamdan selaku Kepala Bidang P2P Implementasi Vaksinasi di Pekanbaru sudah dilakukan sejak Januari 2021, dengan target sasaran awal yaitu tenaga kesehatan dan target usia lanjut (lansia) sampai bulan maret 2021 sudah terlaksana. Di bulan Mei Dinas Kesehatan melakukan Vaksinasi dengan target Pelayanan Publik, dimulai dari Anggota Dewan, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, dan Pekerja Umum. Di bulan Juni Vaksin untuk masyarakat umum, jumlah orang yang sudah di Vaksin sekitar 400 ribu jiwa. Target Pemerintah Kota sebanyak 800 ribu jiwa sedangkan pusat 700 ribu lebih

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Menganalisis implementasi kebijakan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2021 ditinjau dari Sistem-approach dari teori MSN-approach selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk Mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2021 ditinjau dari Sistem-approach dari teori MSN-approach.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan tujuan dapat memahami tentang fenomena apa yang dialami subjek peneliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif peneliti ingin melihat perilaku, tindakan, motivasi, persepsi secara holistic dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang baik dengan memanfaatkan berbagai ilmiah. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu permasalahan yang sedang peneliti teliti, dengan mengumpulkan data secara cermat dan mendalam yang melibatkan berbagai informan dan pegamatan, wawancara, dokumentasi dan dokumentasi laporan. Dengan itu peneliti mengumpulkan data terkait dengan implementasi kebijakan vaksinasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN-*Approach* (Analisis System Approach Penyelenggaraan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru), berjalannya kebijakan ini berdasarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat agar terbentuknya *Herd Immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pada awal implementasi kebijakan vaksinasi ada beberapa permasalahan, peneliti melakukan observasi lapangan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan tempat Pelaksanaan Pelayanan Vaksinasi untuk melihat proses yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru apa sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan serta mewawancarai beberapa Informan dapat dilihat dalam melaksanakan kebijakan cukup baik namun ada kendala dalam menjalankan proses kebijakan vaksinasi yaitu masyarakat yang enggan di Vaksin, target lansia yang susah di capai, terbatasnya stok Vaksin, keterlambatan distribusi stok vaksin, jumlah data yang kurang sinkron, banyak masyarakat yang sudah vaksin namun tidak mendapatkan bukti sertifikat vaksin. Sehingga dari permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menjalankan kebijakan vaksinasi tersebut. Maka dari itu, Dinas kesehatan memerlukan kerjasama di berbagai kesehatan baik swasta maupun dari Pemerintah agar tujuan dari vaksinasi berjalan dengan sesuai kebijakan yang telah di keluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Yulianto Kadji yaitu Model MSN-*approach*, Yulianto Kadji mengembangkan sebuah model yang bernama Model Implementasi Kebijakan melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau disebut MSN-*approach*. Pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of stakeholders*, yaitu *Government, Private sektor*, dan *Civil Society*.

Implementasi Kebijakan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kota Pekanbaru Periode 2021

Implementasi merupakan bagian dari satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut Yulianto Kadji adalah implementasi kebijakan Yulianto Kadji bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yaitu: *Government, Private Sector, dan Civil Society* (Kadji, 2015:86). Implementasi kebijakan merupakan tahapan bagi pembuatan keputusan, sama halnya dengan pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian dari tujuan akhir, tercapai atau tidaknya tujuan yang hendak di capai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari suatu proses dengan mempertanyakan dari pelaksanaan program yang telah ditentukan. Dengan melihat *action* program dari *individual project* dan melihat tujuan program tersebut tercapai. Berdasarkan Teori dari Yulianto Kadji yaitu Model Implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*. Kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu: *Government, Private Sector, dan Civil Society*. Kebijakan *MSN-approach* terkhusus *Systems-approach* (Pendekatan Sistem). Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi kebijakan vaksinasi dalam tinjauan *MSN-Approach* (analisis system approach penyelenggaraan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di kota pekanbaru) berdasarkan pendekatan sistem yang dapat 3 indikator yaitu:

System-Approach (Pendekatan Sistem)

Implementasi kebijakan vaksinasi dalam tinjauan *MSN-approach* di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya tentu saja perlu diperhatikan bagaimana sistem kerja sebuah kebijakan, dalam teori Yulianto Kadji menjelaskan dalam buku yang berjudul “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Dalam Fakta Realitas” ada satu sistem pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri. (Kadji, 2015: 90).

Dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru harus memiliki sistem dalam melaksanakannya, karena dengan sistem yang baik tentu akan menghasilkan sebuah produk kebijakan yang baik. Didalam

sebuah sistem terdapat komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, dalam kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru terdapat komponen yang saling mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Dalam sistem-*approach* menyebutkan bahwa ada beberapa indikator fokus, yaitu sistem regulasi, sistem nilai budaya, dan sistem struktur dari organisasi. yang merupakan faktor penentu dalam hal menentukan tercapainya implementasi kebijakan, terutama dalam implementasi kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru. Dalam implementasi kebijakan vaksinasi, tentunya peran tenaga kesehatan sangat di butuhkan, kebijakan ini di buat benar-benar untuk kepentingan publik dan untuk meningkatkan produktivitas vaaksinasi di Kota Pekanbaru, pemerintah melakukan berbagai cara dengan mengadakan vaksinasi massal di berbagai tempat yang gampang di akses masyarakat dan meningkatkan layanan informasi publik yang dapat bertanggung jawab.

Sistem Regulasi

Dalam sistem regulasi (Yulianto Kadji) mendeskripsikan dalam bentuk sub sistem kepentingan publik, partisipatif dan produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan sebagai implementor (aparatnya) meyakinkan bahwa regulasi yang di bentuk benar-benar untuk kepentingan publik secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam implementasi kebijakan vaksinasi, tentunya peran tenaga kesehatan sangat di butuhkan, kebijakan ini di buat benar-benar untuk kepentingan publik dan untuk meningkatkan produktivitas vaaksinasi di Kota Pekanbaru, pemerintah melakukan berbagai cara dengan mengadakan vaksinasi massal di berbagai tempat yang gampang di akses masyarakat dan meningkatkan layanan informasi publik yang dapat bertanggung jawab.

Sistem Nilai Budaya

Yulianto kadji (2015:91) nilai budaya dalam implementasi kebijakan salah satunya mengenai kegotong royongan. Hal ini dimana kegotong royongan merupakan modal utama sebagai penggerak dan penentu sebuah keberhasilan serta keberlanjutan pembangunan. Setiap bangsa dan Negara memiliki kebudayaan yang khas sehingga dapat membedakan dari bangsa lainnya. Bangsa Indonesia dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Salah satu nilai budaya yang masih melekat di masyarakat Indonesia sampai saat ini yaitu budaya gotong royong, yaitu aktivitas bekerja sama antara warga untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Implementasi Kebijakan vaksinasi juga menerapkan pelayanan vaksinasi gotong royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi syarat. Pelaksanaan vaksinasi gototong royong ini dilakukan melalui kerja sama

antara badan hukum/badan usaha dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta.

Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi

Yulianto Kadji (2015:91) mendeskripsikan Sistem struktur dan fungsi organisasi dalam implementasi kebijakan yaitu adanya ketergantungan (*interdependensi*) antara Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), maupun kalangan *entrepreneur/Private Sector* dan *Civil Society* secara tidak langsung dapat diketahui akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan vaksinasi yang dapat menunjukkan bahwa adanya ketergantungan (Interdependensi) antara 3 (tiga) dimensi *policy of stakeholder* atau 3 pihak yang bersinggungan dengan kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam menjalankan Implementasi kebijakan vaksinasi Kota Pekanbaru demi terbentuknya kekebalan tubuh manusia untuk melawan covid-19 Pemerintah memerlukan tenaga dari pihak swasta dengan memfasilitasi alat untuk melaksanakan vaksinasi, dalam hal ini pihak swasta tidak perlu mengeluarkan biaya untuk keperluan vaksin, karena semua sudah ditanggung jawabkan oleh Pemerintah. Hal ini sudah tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (covid-19) pada pasal 30 ayat (3) yaitu peralatan pendukung dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit *syringe*, kapas, alkohol, alat pelindung diri, (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*, dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

Hambatan dalam implementasi kebijakan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di Kota Pekanbaru

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi di kota Pekanbaru masih terjadi hambatan. Adapun hambatan dalam kebijakan vaksinasi sebagai berikut:

Lansia yang enggan untuk di vaksin

Semenjak terjadinya kasus covid-19 di Indonesia, masyarakat yang banyak terpapar virus covid, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib vaksinasi untuk semua orang. Namun vaksin lansia belum mencapai target.

Terjadi antrian panjang pada saat pendataan vaksinasi

Sebelum melaksanakan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memerlukan data setiap masyarakat yang hendak di vaksin. Lalu Dinas Kesehatan mengimput data masyarakat melalui online, dengan adanya data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengetahui berapa banyak orang yang sudah di vaksin dan orang yang belum di vaksin. Dalam pelaksanaan pendataan vaksinasi masih terjadi kendala. dapat kita ketahui bahwa terjadinya hambatan dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi, pengimputan data yang lama, sehingga mengakibatkan antrian panjang.

Selain pengimputan data yang lama mengakibatkan antrian panjang di akibatkan karena hal lain:

Observasi pasca vaksinasi

Sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit terbentuk secara alami pada saat seseorang terkena virus. Namun virus corona punya resiko kematian dan menular dengan cepat. Dengan melakukan vaksin kepastian keamanan merupakan upaya menurunkan resiko, dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Setelah di vaksin masyarakat perlu melakukan observasi pasca vaksinasi.

Stok Vaksin Terbatas

Pekanbaru pernah mengalami ketersediaan stok vaksin yang terbatas, dengan itu kegiatan vaksin untuk penyuntikan pertama distop di seluruh tempat pelayanan, rumah sakit dan juga puskesmas. Dengan stok yang tidak memadai kegiatan vaksin tertunda dan pemerintah mesti memberi tahu kepemerintah pusat agar segera di kirimkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan berisi deskripsi yang harus menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan ulangi abstrak atau hanya menggambarkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang tegas tentang kemungkinan adanya saran dan rekomendasi yang terkait dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama
- Nugroho, R. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, J. L. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Nugroho, R. (2014). PUBLIC POLICY 5-Edisi Revisi. Elex Media Komputindo
- Miles, M dan Huberman, M. (2014). ANALISIS DATA KUALITATIF. UI-Press
- Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan Dan Perilaku Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 131-137.
- Sari, I. P., & Sriwidodo, S. (2020). Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19. Majalah Farmasetika, 5(5), 204-217.
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM), 8(2), 100-109.
- Shafa, A., & Sriwidodo, S. (2021). Microneedle: Teknologi Baru Penghantar Vaksin COVID-19. Majalah Farmasetika, 6(1), 85-98.
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2).
- Asyafin, M. A., Virdani, D., & Arif, L. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501-510.